

LAPORAN RENJA Perubahan (Rencana Kerja) TAHUN 2019



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMANJANG**

Jl. Alun-alun Utara no. 7 Telp. (0334) 8780990
LUMANJANG - 67316



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran startegis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD OPD yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Komunikasi.
12. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika Renja - OPD

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2018)

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lumajang merupakan OPD baru yang disahkan melalui Perda No. 72 tahun 2016 yang sebelumnya merupakan Bagian Humas Sekretariat Daerah, Komunikasi dan Informatika. Pada Tahun Anggaran 2018 Bidang Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 5 program dan 16 kegiatan dengan capaian Kinerja Keuangan sebagai berikut :

1. Program pengelolaan informasi dan media massa, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain :
 - 1) Pengelolaan radio suara lumajang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97%.
 - 2) Forum pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), memiliki nilai realisasi anggaran 93%.
 - 3) Kerjasama informasi dan media massa, memiliki nilai realisasi anggaran 96%.
2. Program optimalisasi pengelolaan komunikasi publik, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain :
 - 1) Workshop SDM Dalam bidang komunikasi dan informasi memiliki nilai realisasi anggaran 93%.
 - 2) Pembinaan Kelompok informasi masyarakat (KIM) memiliki nilai realisasi anggaran 66%.
 - 3) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki nilai realisasi anggaran 101%.
3. Program optimalisasi pengelolaan teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain :
 - 1) Pengembangan website memiliki nilai realisasi anggaran 96%.
 - 2) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik memiliki nilai realisasi anggaran 96%.
 - 3) Pembangunan jaringan teknologi informasi memiliki nilai realisasi anggaran 99%.
 - 4) Pengkajian dan pengembangan teknologi informasi memiliki nilai realisasi anggaran 99%.
 - 5) Bimbingan teknis pengelolaan website memiliki nilai realisasi anggaran 92%.
 - 6) Layanan pengadaan secara elektronik memiliki nilai realisasi anggaran 80%.

- 7) Bimbingan teknis aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) memiliki nilai realisasi anggaran 59%.
4. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain :
 - 1) Pengolahan, updating, dan analisis data statistik daerah memiliki nilai realisasi anggaran 89%.
 - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan memiliki nilai realisasi anggaran 67%.
5. Program pengamanan informasi pemerintahan daerah memiliki kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan persandian daerah memiliki nilai realisasi anggaran 61%.

Adapun capaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 terlampir I .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo kabupaten Lumajang Tahun 2018 ,ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan umum yaitu :

1.) Pengembangan Website

Ruang lingkup Kegiatan Pengembangan Website adalah kegiatan yang meliputi pengembangan fitur-fitur layanan website resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang serta pengelolaan ketersediaan data dan informasi yang ditampilkan. Dengan Tujuan Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat terhadap website lumajangkab.go.id.

Kegiatan Pengembangan Website pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyerap dan menyebarkan informasi yang diterima melalui website resmi Pemkab. Lumajang. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Website dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang. Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Struktural sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan peserta kegiatan Tim Teknis TIK Dinas Komunikasi dan Informatika dan Penyedia barang/jasa. Cara Pelaksanaan Kegiatan : Menyusun dan menetapkan SK Tim Pengelola Website, Menyusun dan menetapkan SK tenaga teknis TIK dan Belanja Pemeliharaan infrastruktur berupa lisensi. Total biaya yang dibutuhkan pada kegiatan Pengembangan Website dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 134.925.000. persentase capaian kinerja keuangan kegiatan ini sebesar 99,27%.

2.) Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Program pengelolaan informasi dan media massa adalah suatu program untuk mengupayakan sebuah layanan informasi ditujukan untuk masyarakat lumajang. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Jumlah OPD dan BUMD : 72. yang sudah/aktif melakukan Koordinasi kegiatan : 28 OPD yang pasif : 44 OPD. Jumlah Media massa untuk kerjasama publikasi 47 media, Jumlah Konten berita yang di informasikan : 400 konten.

3.) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kegiatan Sosialisasi/ Pembinaan PPID ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka, dengan mengundang nara sumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

4.) Kelompok Informasi Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang melalui Bidang Komunikasi Publik dan Persandian, Seksi Kemitraan Komunikasi Publik telah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Sebagai agen informasi yang bisa membantu menyebarkan berita-berita dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, KIM perlu diberi pembinaan, arahan, peningkatan kapasitas, serta sosialisasi program-program pemerintah Kabupaten Lumajang agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya KIM dapat bekerja dengan baik dan terarah.

Kemampuan KIM meningkat dan berkembang di berbagai aspek penyebaran informasi seperti bagaimana membuat blog yang baik, bagaimana menulis dan mengunggah informasi yang baik. Selain itu Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi KIM sebagai mitra Pemerintah dalam penerimaan, pengolahan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. KIM diharapkan lebih terbekali dan lebih terarah dalam membantu pemerintah untuk penyebaran informasi. Selain itu KIM juga akan memperoleh tambahan wawasan serta pengetahuan baru tentang informasi pemerintahan.

5.) Pengelolaan Media Publik

Pemerintah dituntut untuk kreatif dan memperbanyak informasi hasil-hasil pembangunan melalui media luar ruang (benner/baliho/vidiotron/anjungan informasi), media sosial/media center, majalah, dan sebar serap informasi.

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah kombinasi antara swakelola dan kerjasama dengan pihak ketiga.

6.) Penyelenggaraan persandian daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang melalui Bidang Komunikasi dan Persandian. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian yang bisa membantu mengamankan berita – berita, radio gram dan informasi dari Pemerintahan yang perlu pengamanan sesuai derajat dan klasifikasinya. Serta didukung dengan peralatan atau materiel /alat penunjang atau pendukung dalam melaksanakan pengamanan informasi dan persandian dalam Pemerintahan.

Pengawasan Menara telekomunikasi (Tower) dalam rangka memperlancar arus komunikasi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu antara lain :

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakat.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir.
6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern.
7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Adapun hasil review terhadap RKPD 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 1.775.180.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar

Rp. 919.200.280,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 2.870.402.000,00
Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 952.004.420,00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 28.601.000,00
Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 9.559.000,00
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 3.259.987.000,00
Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 1.634.663.500,00
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 522.900.000,00
Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 860.000.000,00
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 2.413.395.000,00
Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 594.883.000,00
7. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 1.089.320.000,00
Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 84.825.000,00
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 2.126.091.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena ada penambahan anggaran untuk belanja infrastruktur daerah (penambahan server, bandwidth dan jaringan terintegrasi) yaitu sebesar Rp. 4.416.721.800,00

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 476.420.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 184.840.000,00

Adapun Tabel Review Terhadap Rancangan awal RKPD Terlampir II.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Lumajang Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan usulan program dan kegiatan dari Kecamatan Gucialit yaitu Pengadaan alat studio dan komunikasi (pengadaan tower), dan dari Kecamatan Klakah yaitu Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

A. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu **“Amreta Brata Wira Bhakti”**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

B. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. **Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan

pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right

place); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban misi ke tiga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

A. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)”

B. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu;

Indikator sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu” adalah Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu dan dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100 \%$$

Sitem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE antara lain portal pengaduan, PPID, portal berita, JDIH, e-Musrenbang, dll.

2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

Indikator sasaran “Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik” adalah Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik dan dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik}}{\text{Jumlah Badan Publik}} \times 100 \%$$

Badan publik adalah badan publik yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri, misalnya OPD dan Pemerintah Desa.

Adapun standar layanan informasi publik yang ditetapkan adalah sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD/LAKIP
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

- e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD
- 4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
 - a. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - b. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
 - c. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
- 5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
 - a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan
- 6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - a. Peningkatan kemitraan komunikasi publik
 - b. Pengelolaan media publik
- 7. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
 - a. Peningkatan keamanan informasi dan persandian
- 8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - a. Pengelolaan dan pengembangan informatika
 - b. Pemberdayaan informatika
 - c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - a. Layanan data dan statistik

Adapun Tabel RENJA 2019 Terlampir III

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi yang diharapkan.

Lumajang, 05 APRIL 2019

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



DEWI SAWITRI, S.Kom

Penata Tk.I

NIP. 19800813 200501 2 016

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2018

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		22 Prioritas Nasional (Program)	Ket
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12 =		13 = 12 / 7 x 100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
A	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa		1.694.572.000		161.241.200		979.890.215		637.778.095		1.617.668.310		1.617.668.310		95	Reformasi Birokrasi	
	Pengelolaan Radio Suara Lumajang	jumlah partisipasi masyarakat dalam program acara radio suara lumajang	700 partisipan	281.372.000	9.696	25.668.000	8.558	79.912.000	8.130	193.891.095	8.130	273.803.095	34.514	273.803.095	4931	97		
	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	jumlah forum PPID yang dibina	72 PPID	266.100.000	-	2.550.000	72	75.878.215	72	170.887.000	72	246.765.215	72	246.765.215	100	93		
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah konten informasi yang disebarluaskan	400 konten	1.147.100.000	1.959	58.500.000	1.959	824.100.000	385	273.000.000	229	1.097.100.000	3.918	1.097.100.000	980	96		
2	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah penyebarluasan informasi melalui pengelolaan komunikasi publik		982.829.000		74.523.200		741.918.042		74.523.200		816.441.242		816.441.242		83	Reformasi Birokrasi	
	Workshop SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta workshop yang aktif berpartisipasi dalam jurnalisme warga (citizen journalism)	80 orang	54.380.000	-	-	80	50.430.000	-	-	-	-	80	50.430.000	100	93		
	Pembinaan KIM	jumlah KIM yang dibina	21 KIM	494.085.000	-	21.000.000	21	305.845.242	-	-	-	-	21	326.845.242	100	66		
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah saluran sebaran informasi melalui media luar ruang/media sosial/media center dan majalah	128 buah	434.364.000	90 media luar ruang, 0 majalah	53.523.200	58 media luar ruang, 1 majalah	385.642.800	27 media luar ruang, 0 majalah	53.523.200	26 media luar ruang, 1 majalah	439.166.000	201 media luar ruang, 4 majalah	439.166.000	157	101		

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		22 Prioritas Nasional (Program)	Ket
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12 =		13 = 12 / 7 x 100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
3	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	Jumlah penyebarluasan informasi melalui pengelolaan TIK		880.019.000		45.339.950		640.363.542		164.729.950		805.093.492		805.093.492		91		
	Pengembangan website	jumlah kunjungan terhadap website	2000 kunjungan	139.005.000	4.212	14.440.000	4.881	119.495.000	9.669	14.440.000	21.976	133.935.000	21.976	133.935.000	455	96		
	Penyusunan sistem Informasi terhadap Layanan Publik	jumlah web aplikasi /sub domain yang dikelola	31 aplikasi	106.340.000	17	4.410.000	17	97.240.000	26	4.410.000	36	101.650.000	36	101.650.000	116	96		
	Pembangunan jaringan teknologi informasi	jumlah pelayanan publik yang terintegrasi	3 layanan	220.560.000	-	-	4	218.097.000	-	-		218.097.000	4	218.097.000	133	99		
	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Pedoman tata kelola pengembangan TIK di Kabupaten Lumajang	2 dokumen	103.800.000	-	-	-	-	1	51.310.000	1	102.620.000	2	102.620.000	100	99		
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Website	jumlah pengelola TIK OPD yang bisa mendistribusikan informasi melalui website	80 orang	26.050.000	-	-	80	11.975.000	-	-	80	23.950.000	160	23.950.000	200	92		
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	350 paket	267.964.000	50	26.489.950	61	188.761.542	-	-	192	215.251.492	192	215.251.492	55	80		
	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	jumlah peserta bimtek aplikasi SPSE	40 orang	16.300.000	-	-	40	4.795.000	-	-	30	9.590.000	70	9.590.000	175	59		
B	STATISTIK																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Jumlah penyebarluasan informasi melalui pengelolaan data statistik daerah		94.970.000		4.660.000		73.484.000		8.626.000		82.110.000		82.110.000		86	Reformasi Birokrasi	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		22 Prioritas Nasional (Program)	Ket
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9		10		11		12 =		13 = 12 / 7 x 100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
	Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah	jumlah diseminasi informasi data statistik daerah kepada masyarakat	10 informasi	84.620.000	52	3.720.000	121	71.500.000	-	-	75.220.000	173	75.220.000	1730	89			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah data OPD yang mutakhir	72 OPD	10.350.000	-	940.000	72	1.984.000	72	4.908.000	72	6.890.000	72	6.890.000	100	67		
C	PERSANDIAN																	
1	PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah penyebarluasan informasi yang bersandi		241.100.000		3.669.537		143.785.483		3.669.537		147.455.020		147.455.020		61	Reformasi Birokrasi	
	Penyelenggaraan Persandian Daerah	jumlah informasi yang bersandi	50 informasi	241.100.000	7	3.669.537	16	143.785.483	12	3.669.537	15	147.455.020	50	147.455.020	100	61		
Rata-rata capaian kinerja (%)														596				
Predikat kinerja														ST				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya sumberdaya antara lain SDM, sarana dan prasarana, tersedianya anggaran, adanya perencanaan, dan adanya kelompok informasi																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya tenaga profesional, prasarana dan sarana belum memadai, anggaran belum mencukupi, dan belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):																		

KETERANGAN :

K : Indikator kinerja (usahakan dalam bentuk kuantitatif, apabila tidak bisa dikuantitatifkan, boleh kualitatif). Lihat ouput dalam DPA kegiatan SKPD Saudara
Rp : Nilai Rupiah Anggaran/ Realisasi

Apabila Program/ kegiatan tersebut belum dilaksanakan/terrealisasi kolom diisi angka "0"



**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Tahun 2019
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	RENCANA AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	pagu indikatif		Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	60%	1.775.180.000,00	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	96%	919.200.280,00	
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Kantor Dinas Kominfo	jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	12 bln			Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	12 Bulan		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	70%	2.870.402.000,00	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	96%	952.004.420,00	
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	34 unit			Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah sarana prasarana yang tersedia/direhab	12 Jenis Sarana dan Prasarana		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	72 unit			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	18 jenis Sarana dan Prasarana		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	60%	28.601.000,00	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	60%	9.559.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	pagu indikatif		Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah laporan saki yang disusun	13 dok			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah laporan lakip yang disusun	1 Laporan		
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	6 dok			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	1 Laporan		
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	30 dok			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan		
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat		Jumlah laporan IKM	6 dok			Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat		Jumlah laporan IKM	1 Laporan		
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		Jumlah laporan RKA yang disusun	106 bendel			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		Jumlah dokumen RKA yang disusun	3 dok		
4	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa		Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	80%	3.259.987.000,00		Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa		Meningkatnya Persentase diseminasi informasi publik	80%	1.634.663.500,00	
	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Jumlah forum PPID yang dibina	72 PPID			Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Jumlah forum PPID yang dibina	72 PPID		
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa		Jumlah konten informasi yang disebarluaskan	400 Konten			Kerjasama Informasi dengan Media Massa		Jumlah konten informasi yang disebarluaskan	400 konten		
	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik		Jumlah konten informasi yang tersedia	400 Konten			Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik		Jumlah konten informasi yang tersedia	400 konten		

NO	RENCANA AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	pagu indikatif		Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	Kebutuhan Dana	
5	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai	70%	522.900.000,00	5	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Persentase cakupan pencapaian ketentuan perundang - undangan dibidang cukai	98%	860.000.000,00	
	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan		jumlah sebaran Informasi melalui banner/baliho/videotron/Media Massa/Sosialisasi	4 jenis			Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan		Jumlah saluran penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	4 saluran penyampaian informasi		
6	Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik		Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan komunikasi publik	80%	2.413.395.000,00		Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik		Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	20%	594.883.000,00	
	Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	21 KIM			Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	41 KIM		
	Pengelolaan Media Publik		jumlah saluran sebaran Informasi melalui media luar ruang(Banner/baliho/videotron/anjunagn informasi), Media Sosial/Media Center, majalah, dan Sebar serap informasi	140			Pengelolaan Media Publik		jumlah media publik yang dikelola	7 media publik		

NO	RENCANA AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	pagu indikatif		Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	Kebutuhan Dana	
7	Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah		jumlah penyebarluasan informasi yang bersandi	70%	1.089.320.000,00	7	Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	60%	84.825.000,00	
	Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian		jumlah informasi yang bersandi	50 Informasi			Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	50 PD		
8	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan TIK	80%	2.126.091.000,00	8	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	70%	4.416.721.800,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Informatika		jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola	50 web aplikasi/sub domain			Pengelolaan dan Pengembangan Informatika		Jumlah terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu	33 website		
	Pemberdayaan Informatika		Jumlah SDM yang mengikuti bimtek	320 orang			Pemberdayaan Informatika		Jumlah Pengguna SPBE yang dibina	340 orang		
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	350 paket			Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	200 Paket		
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan data statistik daerah	70%	476.420.000,00	9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 sistem	184.840.000,00	

NO	RENCANA AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	pagu indikatif		Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	Kebutuhan Dana	
	Layanan Data dan Statistik		Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi kepada masyarakat	15 informasi			Layanan Data dan Statistik		Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi kepada masyarakat	16 data		

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



DEWI SAWITRI, S.Kom

Penata Tk.1

NIP. 19800813 200501 2 016

**BLANGKO ISIAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	70%	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	70%	Pengelolaan dan Pengembangan Informatika	Jumlah terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu	33 website	3.815.080.800
						Pemberdayaan Informatika	Jumlah Pengguna SPBE yang dibina	340 orang	290.027.000
						Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	200 Paket	311.614.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 sistem	Layanan Data dan Statistik	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah yang terintegrasi kepada masyarakat	16 data	184.840.000
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	80%	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Persentase diseminasi informasi publik	80%	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah forum PPID yang dibina	72 PPID	197.947.500
						Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah konten informasi yang disebarluaskan	400 konten	953.100.000
						Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik	Jumlah konten informasi yang tersedia	400 konten	483.616.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase cakupan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.	98%	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan	Jumlah saluran penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	4 saluran penyampaian informasi	860.000.000
			Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	20%	Peningkatan Kemitraan Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang memiliki blog	41 KIM	82.000.000
						Pengelolaan Media Publik	jumlah media publik yang dikelola	7 media publik	512.883.000
			Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	60%	Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	50 PD	84.825.000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	96%	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	12 Bulan	919.200.280

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	96%	Pembangunan/Pe ngadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang tersedia/direhab	12 Jenis Sarana dan Prasarana	377.729.420
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	18 jenis Sarana dan Prasarana	574.275.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	60%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan lakip yang disusun	1 laporan	2.125.000
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	1 laporan	480.000
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1.470.000
						Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM	1 laporan	1.500.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
						Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	3 dokumen	3.984.000

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

